



LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH



**PEMETAAN POTENSI DESA
UNTUK MENDORONG
EFEKTIFITAS PEMANFAATAN
DANA DESA**



**EDISI XLVIII
JUNI 2025**



Latar Belakang

Dana desa menjadi instrumen desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu secara langsung mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, realisasi dana desa yang disalurkan meningkat dari 2015 yaitu 20,18 triliun menjadi 61,16 triliun di September 2024 (DJPK, 2025). Berdasarkan data, alokasi yang besar ini juga diimbangi dengan dampak positif yaitu meningkatnya jumlah desa mandiri dari 5ribu-an pada tahun 2021 menjadi 20ribu-an pada tahun 2024 dan berkurang secara signifikan desa tertinggal dari 25ribu-an (2018) menjadi 5ribu-an (2024).

Perkembangan positif ini membuka peluang untuk melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta inklusif dengan infrastruktur pelayanan publik dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal yang lebih baik. Namun, pemanfaatan dana desa masih perlu terus dioptimalkan. Salah satu indikasinya adalah masih cukup banyaknya desa yang masuk kategori berkembang dan tertinggal (IDM, 2025). Hal ini kemungkinan disebabkan adanya pemanfaatan data potensi desa yang masih minim dalam penyusunan RKPDes atau APBDes, sehingga terdapat kemungkinan program pembangunan desa cenderung dirancang secara umum, seragam dan administratif. (Nyoman Subanda et al, 2020).



Padahal potensi desa dapat beragam mulai dari pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dengan UMKM sebagai pelaku usaha yang dominan. Pemetaan potensi desa yang disesuaikan dengan karakteristiknya jika dilakukan secara sistematis dan partisipatif akan menjadi dasar perencanaan yang efektif serta kontekstual. Data potensi desa juga akan membuka akses pendanaan sektor publik dan spesifik melalui kolaborasi swasta dan lembaga pendidikan. Lebih lanjut, Pemerintah melalui Permendes dan instrumen kebijakan 2024–2025 menetapkan bahwa Dana Desa harus dialokasikan khusus untuk ketahanan pangan, BLT/kemiskinan ekstrem, pengembangan potensi desa seperti pariwisata dan BUMDes, serta program padat karya lokal. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa pemetaan potensi desa sangat penting untuk menjadi basis pemanfaatan dana desa agar semakin efektif.

LPEFD pada edisi ini hadir untuk menambahkan diskusi penyusunan kebijakan dengan menjawab tantangan Bagaimana strategi pemetaan potensi desa dapat digunakan sebagai dasar perencanaan Dana Desa yang lebih berdampak. Melalui pemetaan komprehensif yang mengintegrasikan data spasial, ekonomi, sosial budaya, dan kolaborasi masyarakat, diharapkan RKPDes dan APBDDes menjadi lebih berbasis bukti, relevan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara terukur dan berkelanjutan. Dengan pendekatan seperti ini, harapannya Dana Desa akan terus bertransformasi menjadi instrumen produktif yang memberdayakan masyarakat, memperkuat tata kelola desa, dan mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing.



Rumusan Masalah dan Tujuan Analisis

Analisis dalam LPEFD kali ini fokus kepada bagaimana memanfaatkan pemetaan data potensi desa ini dapat meningkatkan efektifitas pemanfaatan Dana Desa. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini lebih kepada mengidentifikasi pendekatan metode pemetaan potensi desa, menganalisis potensi desa berdasarkan karakteristiknya serta memberikan rekomendasi untuk integrasi pemetaan potensi dalam perencanaan dan penganggaran Dana Desa.

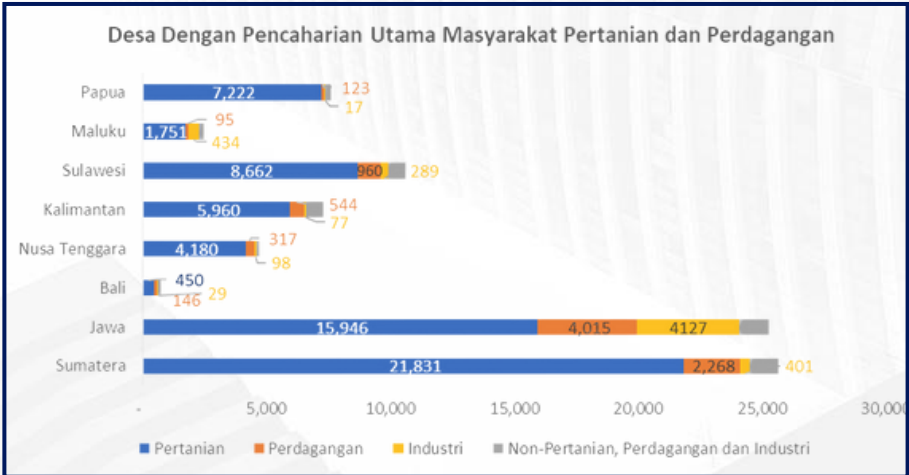
Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif terkait dengan potensi desa. Pemetaan potensi akan dilakukan terhadap potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi/ SDA, serta potensi sarana dan prasarana. Data yang digunakan juga merupakan data sekunder yang diambil dari data PODES yang dipublikasi BPS tahun 2024.

Hasil Temuan dan Analisis

Berdasarkan data PODES tahun 2024, masyarakat desa Indonesia memiliki mata pencaharian utama dibidang Pertanian yaitu sekitar 66.002 Desa/Kelurahan dan 8.468 Desa/Kelurahan di bidang Perdagangan. Selain itu, terdapat 5.472 Desa/Kelurahan berusaha dengan sektor industri. Mata pencarian lainnya yaitu pertambangan/jasa dimiliki 4.334 Desa/Kelurahan. Secara kewilayahan, Jawa dan Sumatera memiliki desa terbesar yang sebagian besar terletak pada pertanian. Namun sebagian besar (53.13%) masyarakat desa pertanian belum memiliki irigasi dan bendungan. Dari 66.002 Desa yang ada, 27.672 desa memiliki irigasi saja dan 2.938 desa memiliki bendungan saja. Dengan demikian, perlu optimalisasi pengembangan fasilitas irigasi agar produktifitas pertanian dapat lebih meningkat.

Di sisi lain, pada desa dengan keberadaan industri kecil dan mikro, sektor industri yang paling banyak digeluti adalah industri makanan, industri minuman, Industri Furnitur dari Kayu, Rotan/Bambu, Plastik, Logam dan industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang Anyaman.



Sumber : Podes 2024, diolah Kemenkeu



Sumber : Podes 2024, diolah Kemenkeu

Catatan :
 Industri Makanan
 Industri Minuman
 Industri Furnitur dari Kayu, Rotan/Bambu, Plastik, Logam
 Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang Anyaman dari Bambu,

Berdasarkan peta potensi desa 2024 diatas, nilai tambah produk yang paling potensial ditingkatkan adalah pada makanan dan minuman yang memuat kearifan lokal yang langka di pasaran baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, rotan, keramik dan kayu juga menempati posisi yang tinggi di kalangan industri kecil di desa. Produk andalan yang paling banyak dimiliki desa dan diekspor ke negara lain berada di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini memberikan potensi meningkatkan daya saing desa dan Indonesia di mata dunia karena permintaan produk ini sangat tinggi. Sementara itu, Daerah-daerah yang paling menantang dalam mengakses pasar dan pertokoan sehingga aktivitas industri lancar dan perlu diperbaiki adalah pada wilayah Papua dan Maluku.



Sumber : Podes 2024, diolah Kemenkeu

Stimulus investasi desa melalui pertanian, industri serta perdagangan juga memerlukan akses infrastruktur ekonomi seperti Koperasi, BUMDes, dan Perbankan.



Sumber : Podes 2024, diolah Kemenkeu

Daerah Jawa dan Sumatera memiliki akses paling baik untuk perbankan di desa sehingga masyarakat desa berpotensi lebih besar dalam mencapai kesuksesan menstimulus perekonomian daerah.



Sumber : Podes 2024, diolah Kemenkeu

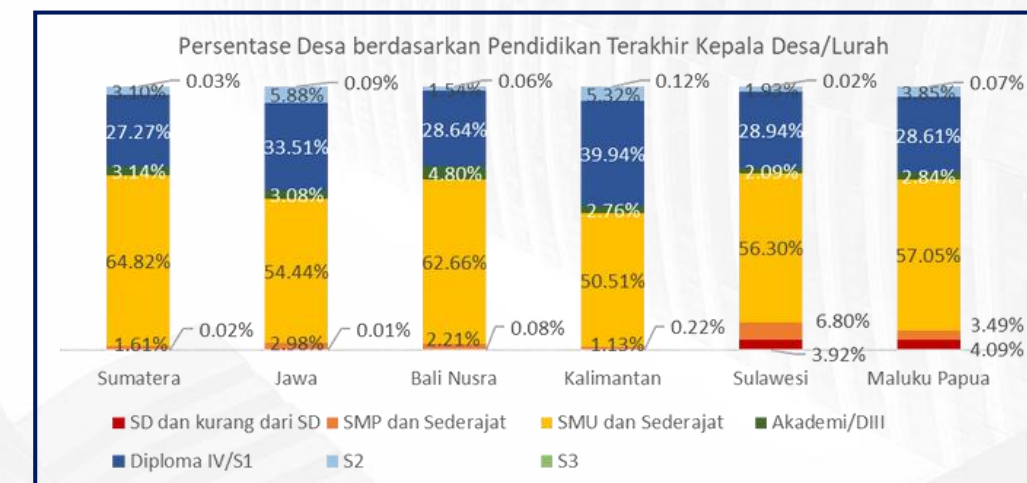
Namun begitu, terdapat 8.531 desa/kelurahan yang masih tidak memiliki infrastruktur ekonomi yang memadai (Tanpa BUMDes, Koperasi dan Bank), 22.260 desa tanpa BUMDes dan Koperasi, serta 73.813 desa tanpa adanya perbankan. Oleh karena itu, perlu diversifikasi selain Bank dalam mendukung aktifitas ekonomi andalan dari masyarakat desa sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih baik terstimulus.



Hadirnya PNM menjadi salah satu langkah strategis dari diversifikasi pembiayaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa khususnya ibu-ibu pra sejahtera.

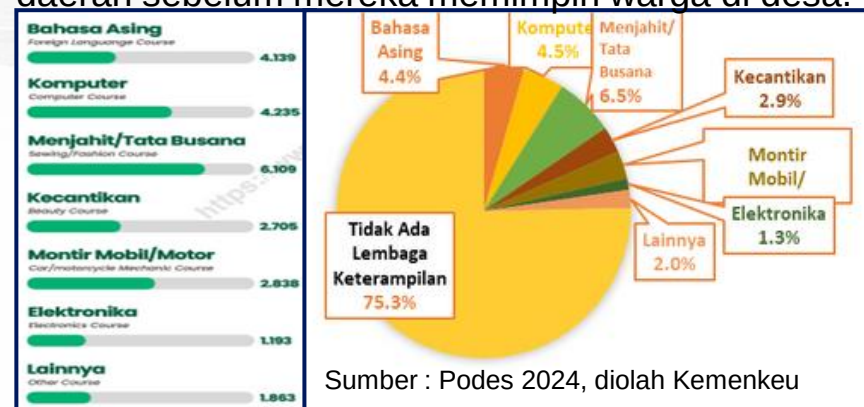
Courtesy : Antara News

Selain infrastruktur, potensi desa juga dapat terlihat dari kualitas perangkat desa yang mumpuni dalam mengelola dana desa agar lebih efektif dalam menstimulus ekonomi desa. Diharapkan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah yang berpendidikan tinggi akan membawa desa menjadi lebih maju dan sejahtera dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terstruktur, efisien dan efektif.



Sumber : Podes 2024, diolah Kemenkeu

Berdasarkan grafik Persentase Desa berdasarkan Pendidikan Terakhir Kepala Desa/Lurah, dapat dilihat bahwa dari seluruh region, lebih dari 50% desa di wilayah tersebut memiliki latar belakang kepala desa/lurah dengan pendidikan setingkat SMU dan sederajat lalu disusul oleh Diploma IV/S1. Meskipun latar belakang pendidikan tinggi belum tentu menentukan kualitas kepemimpinan di desa, namun hal ini dapat menjadi salah satu indikator penting untuk pengembangan kualitas SDM di desa. Lebih lanjut, apabila dilihat di wilayah Sulawesi dan Papua, masih terdapat sekitar 3-4% desa yang kepala desanya memiliki pendidikan terakhir SD dan kurang dari SD dan bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Pemerintah berharap apabila kepala desa/lurah sangat memperhatikan latar belakang pendidikannya, maka akan juga memprioritaskan pendidikan bagi warganya. Tanpa mengesampingkan pentingnya skill kontekstual pada praktek kepemimpinan desa, pendidikan formal juga penting untuk memastikan basic skill para kepala daerah sebelum mereka memimpin warga di desa.



Di sisi lain, keberadaan lembaga keterampilan merupakan indikasi adanya kecenderungan masyarakat memiliki keahlian yang diakui dan digunakan dalam pekerjaan/usahanya. Berdasarkan data podes, sebagian besar desa tidak memiliki lembaga keterampilan (75.33%). Sedangkan keahlian yang paling dominan diminati dan dimiliki serta diakui lembaga keterampilan adalah menjahit/tata busana (6.5%), komputer (4.5%) dan Bahasa asing (4.4%).



Sumber : Podes 2024, diolah Kemenkeu

Pada grafik diatas, terlihat bahwa Sumatera sebagian besar desa memiliki keterampilan menjahit, sedangkan Jawa lebih banyak bahasa asing dan menjahit, Kalimantan dan Sulawesi lebih banyak menjahit dan Maluku Papua banyak keterampilan pada komputer. Keahlian menjahit menjadi salah satu potensi dalam diversifikasi aktivitas ekonomi yang potensial selain pertanian dan menjadi keahlian yang penting untuk transaksi perdagangan pakaian. Oleh karena itu dana desa dapat diprioritaskan untuk meningkatkan keahlian masyarakat desa sesuai dengan potensinya. Dengan peningkatan infrastruktur baik itu pertanian, perdagangan, akses keuangan, pendidikan formal maupun keterampilan dapat menjadi pertimbangan bagi alokasi efektif dana desa yang spesifik dan tidak "one size fits all".



Rekomendasi

Pemetaan potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal dalam mendukung efektifitas pemanfaatan dana desa. Strategi yang perlu dilakukan adalah:

1. Integrasi Pemetaan potensi dalam dokumen perencanaan RKPDes dan APBDes. Setiap desa perlu mengembangkan peta potensi tematik andalan yang akan dihubungkan pada perencanaan kegiatan Dana Desa dan wajib dilampirkan pada RKPDes. Diharapkan program-program yang berbasis karakteristik, potensi dan kebutuhan dapat efektif dalam meningkatkan perekonomian desa.

1. Digitalisasi Sistem Informasi Potensi Desa yang dapat dimiliki di setiap pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dapat diupayakan untuk memiliki dashboard yang berisi informasi potensi desa. Informasi ini akan berguna dalam menetapkan intervensi yang tepat pada desa di daerah provinsi, misalnya dalam menyalurkan bantuan sosial atau mengetahui komoditas andalan yang perlu dikembangkan. Kerjasama pembangunan dashboard ini dapat mengajak swasta dan universitas agar lebih valid dan representatif menggambarkan kekuatan dan kelemahan desa.



Rekomendasi

3.Strategi Pemetaan melalui Pendekatan Klasterisasi dan Perencanaan Kawasan. Potensi desa yang telah dikembangkan akan mendukung pendekatan klasterisasi dan pembentukan Kawasan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi seperti ketahanan pangan, industri maupun pengentasan kemiskinan yang berpengaruh pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Klasterisasi desa akan dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan kebijakan penggunaan dana desa yang selaras dengan potensi desa.

4.Pendampingan khusus dan kemitraan strategis. Perlunya penguatan program pendampingan khusus serta kemitraan swasta maupun penyediaan dukungan fasilitator tematik yang ditujukan untuk meningkatkan potensi serta pertumbuhan ekonomi desa yang berkualitas. Misalnya untuk mengembangkan desa wisata yang dapat menjual aneka komoditas desa yang bernilai tambah tinggi sehingga diperlukan pendampingan dari kemenparekraf yang lebih dapat menginformasikan secara menyeluruh baik dalam maupun luar desa.

5.Mempertahankan Regulasi dan Insentif Berbasis Kinerja Potensi Lokal. Pemerintah pusat atau pemerintah administrasi yang lebih tinggi seperti pemerintah provinsi, kab/kota dapat memberikan atau mengembangkan skema insentif bagi desa yang telah berkinerja baik dalam mengembangkan potensi desa dalam bentuk fiskal maupun non fiskal. Insentif non fiskal antara lain dapat berupa kemudahan akses pada program penguatan BUMDes.



Courtesy : Freepik

Penutup

Strategi pemanfaatan potensi desa tidak dapat berdiri sendiri tanpa komitmen kelembagaan, dukungan kebijakan, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Namun dengan arah yang tepat, Dana Desa dapat menjadi katalisator pembangunan berbasis potensi lokal yang bukan hanya membangun desa hari ini, tetapi juga mempersiapkannya untuk masa depan yang berdaya saing, mandiri, dan inklusif.

Studi Pengembangan Masa Mendatang

Dalam rangka meningkatkan kualitas intervensi kebijakan diperlukan pengembangan studi di masa mendatang yang memprioritaskan pada strategi klusterisasi potensi desa pada sektor andalan yang paling kontributif terhadap perekonomian desa sehingga dapat secara efektif menstimulus perekonomian inklusif pada ekonomi Indonesia.

ASKOLANI • ADRIYANTO • LUDIRO • PURWANTO • SANDY FIRDAUS • LYDIA K CHRISTYANA • RADIES KUSPRIHANTO PURBO • BRITANY A. SEMBIRING • MUHAMMAD HIJRAH • RIAN KELANA EDNUR • MOHAMMAD FAISAL FAHMI Z • ROSSI RIZKI BESTARI • ADI SAPUTRA • M. HARRY KURNIAWAN • MAGDALENA POHAN • BRAMADHONA • BRAMA YUDHA KUSMARA • M. GIN-GIN GINANJAR • DIPA MULYA • YOTASA RA'IDA KHAIRIYAH